

**PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENGENTASKAN
KEMISKINAN DI KELURAHAN TELUK BINJAI KECAMATAN DUMAI TIMUR
KOTA DUMAI**

Oleh: M.Fathan.Salam

E-mail: m.fathan.salam2154@student.unri.ac.id

Dosen pembimbing: Teguh Widodo

E-mail: teguh.widodo@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5, Simpang Baru Pekanbaru 28293 Telp/Fax
0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pengentasan kemiskinan di Kelurahan Teluk Binjai, Dumai. Dengan melibatkan 79 peserta PKH dan menggunakan pendekatan kuantitatif serta teknik simple random sampling, hasil analisis data menunjukkan bahwa pelatihan dalam PKH memiliki pengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($\alpha < 0,05$) pada uji t-statistik. Uji F secara simultan menegaskan bahwa PKH secara signifikan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dengan nilai signifikansi 0,000. Hasil ini mengindikasikan bahwa PKH efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Dengan demikian, program ini memberikan dampak positif secara signifikan, mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi aspek-aspek kemiskinan melalui inisiatif seperti PKH di tingkat lokal.

Kata kunci: PKH, Kemiskinan, Efektivitas, Masyarakat

**FAMILY HOPE PROGRAM (PKH) IN ALLEVIATING POVERTY IN TELUK BINJAI
SUB-DISTRICT, EAST DUMAI DISTRICT, DUMAI CITY**

By: M.Fathan.Salam

e-mail: m.fathan.salam2154@student.unri.ac.id

Lecturer: Teguh Widodo

E-mail: teguh.widodo@lecturer.unri.ac.id

*Departement of Sociology
Faculty of Social Science and Political Science
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simpang Baru Pekanbaru,
28293. Telp/Fax. 0761-63277*

ABSTRACT

This study evaluates the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in alleviating poverty in the Teluk Binjai sub-district of Dumai. Involving 79 PKH participants and utilizing a quantitative approach with simple random sampling, the data analysis indicates that the training within PKH significantly influences poverty alleviation, with a significance value of 0.000 ($\alpha < 0.05$) in the t-statistic test. The simultaneous F-test confirms that PKH significantly contributes to poverty alleviation, with a significance value of 0.000. These results suggest that PKH is effective in reducing poverty levels in the area. Therefore, the program has a significant positive impact, reflecting the success of the Indonesian government's efforts to address various dimensions of poverty through initiatives such as PKH at the local level.

Keywords: *PKH, Poverty, Effectiveness, Society*

PENDAHULUAN

Menurut Badan Pusat Statistik (2016), kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan dan non-pangan, yang diukur berdasarkan pengeluaran. Kemiskinan merupakan permasalahan multifaset yang mempengaruhi seluruh penduduk Indonesia (Bastri et al., 2022). Permasalahan ini dialami oleh semua negara, apapun tingkat perkembangannya. Namun, penyakit ini lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang karena kondisi pembangunan yang tidak stabil dan berkelanjutan (Handrian & Andry, 2020). Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Fakir Miskin, seseorang dianggap miskin apabila tidak mempunyai penghasilan dan/atau mempunyai sarana penghasilan tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya sendiri atau tidak mempunyai penghasilan. dari keluarga mereka.

Kemiskinan memberikan tantangan yang signifikan terhadap proses pembangunan nasional di Indonesia (Rahman et al., 2019). Selain inisiatif pembangunan, serangkaian program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan untuk mengatasi dan memitigasi kemiskinan. Ragam programnya antara lain KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Hermawan, S.P., M.Si dkk., 2021). Keluarga miskin akan mendapatkan serangkaian inisiatif pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk memitigasi masalah yang berasal dari kemiskinan, pemerintah telah menerapkan berbagai inisiatif. Pendekatan untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui penerapan kebijakan yang bertujuan

untuk memberdayakan keluarga miskin. Salah satu kebijakan tersebut adalah penetapan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2007 (ANDRIANY, VICY ANDRIANY, 2022). Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan telah mengambil keputusan (No: 31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007) tentang pembentukan “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan” . Tim ini bertujuan untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial, dengan fokus khusus pada kesehatan dan pendidikan. Guna menjamin jaminan sosial bagi rumah tangga miskin (KM). Program PKH bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial bersyarat. Hal ini diharapkan dapat membantu KM dalam mengurangi beban keuangan dan mendorong perubahan positif dalam perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Tujuan utamanya adalah untuk melahirkan generasi yang lebih sehat dan terdidik yang dapat memutus siklus kemiskinan.

Kecamatan Dumai Timur merupakan pemekaran wilayah Kecamatan Dumai dalam Kota Administratif Dumai. Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Kota Administratif diubah menjadi Kotamadya Dumai. Dahulu terdiri dari 3 Kecamatan, kini diperluas menjadi 5 Kecamatan. Wilayah administratif Kecamatan Dumai Timur terdiri dari lima kecamatan, yaitu: Bukit Batrem, Buluh Kasap, Jaya Mukti, Tanjung Palas, dan Teluk Binjai.

Kecamatan Dumai Timur merupakan kecamatan dengan jumlah KPM lebih banyak dibandingkan kecamatan lainnya. Terdapat penurunan jumlah masyarakat yang menerima manfaat selama dua tahun terakhir. Hasilnya, masyarakat di Kecamatan

Teluk Binjai mengalami peningkatan taraf hidup.

Jumlah penerima bantuan PKH di Teluk Binjai mengalami penurunan. Jumlah penduduk Kecamatan Teluk Binjai sebanyak 18.940 jiwa dengan kepadatan penduduk 15.524 jiwa per kilometer persegi. Kegiatan perekonomian di Kecamatan Teluk Binjai sebagian besar didorong oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang meliputi berbagai macam kuliner mulai dari makanan sate, minuman, dan makanan ringan. Desa Teluk Binjai yang terletak di Kecamatan Dumai Timur telah menjadi penerima Program Keluarga Harapan selama satu dekade. Namun, dampak program dalam mendorong pembangunan yang adil dan mengurangi kemiskinan di desa tidaklah besar.

Kajian bertajuk “Evaluasi Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan” oleh Asmaul Husna dan Arfriani Maifizar yang dimuat dalam Jurnal Masyarakat pada Maret 2023 bertujuan untuk menilai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan. Program Keluarga Harapan dalam mengurangi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan pengambilan sampel non-probabilitas untuk menunjukkan bahwa PKH telah memberikan bantuan secara efektif kepada rumah tangga penerima, sehingga berkontribusi terhadap inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Kajian yang dilakukan oleh Arlina, Muhammad Guntur, dan Umar Nain (2021) dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Lilirawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone” mengkaji pelaksanaan PKH dengan penekanan khusus pada sektor

pendidikan di Desa Lilirawang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH khususnya di bidang pendidikan belum berjalan efektif.

Untuk mengetahui pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pengentasan kemiskinan di Kelurahan Teluk Binjai yang terletak di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dan efektivitas PKH dalam memitigasi angka kemiskinan di daerah tersebut. Penelitian ini berharga bagi akademisi karena memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur sosiologi dan berfungsi sebagai sumber pengetahuan bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Temuan-temuan penelitian ini dapat menjadi umpan balik yang berharga bagi para praktisi pemerintah untuk menyempurnakan program pemerintah dan memberikan masukan dalam pengambilan keputusan kebijakan makro. Selain itu, penelitian ini juga memberikan manfaat bagi para peneliti yang terlibat di dalamnya, yaitu untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai upaya pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Bermula dari permasalahan ini, berdasarkan fakta dan data di atas maka di sini dapat diketahui kesenjangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya Program Keluarga Harapan di Kelurahan Teluk Binjai membuat penulis untuk meneliti sebuah skripsi yang berjudul, “ Program Pengentasan Kemiskinan Keluarga Harapan Di Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai “.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan

Kemiskinan mengacu pada keadaan dimana tingkat kesejahteraan material jauh lebih rendah dibandingkan dengan standar hidup masyarakat saat ini. Individu yang

tergolong miskin adalah mereka yang memiliki tingkat kesejahteraan material yang lebih rendah dibandingkan dengan norma masyarakat yang berlaku (Hermawan, S.P., M.Si et al., 2021).

Kemiskinan kini dipandang tidak hanya sebagai siklus yang terus berlanjut, namun juga sebagai serangkaian permasalahan yang saling berhubungan. Perspektif ini juga tercermin dalam ideologi (Mulatua & Nggeboe, 2017), yang menyoroti sifat rumit dan keterhubungan antar berbagai aspek kemiskinan. Dalam kerangka ini, kemiskinan tidak hanya mencakup ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan mendasar, namun juga mencakup berkurangnya kemampuan fisik dan terbatasnya ketersediaan prospek kemajuan (Almizi & Hermawati, 2018).

Sebagai suatu kondisi yang kompleks, kemiskinan memiliki definisi yang mencakup berbagai dimensi. Dalam perspektif , kemiskinan diartikan sebagai keadaan kekurangan harta atau benda berharga yang dirasakan oleh individu atau kelompok. Akibat dari kekurangan ini, seseorang atau sekelompok orang mengalami keterbatasan dalam membiayai kebutuhan hidupnya secara layak. Penting untuk memahami bahwa kekurangan tersebut tidak hanya terbatas pada kebutuhan material seperti makanan, pakaian, atau tempat tinggal, tetapi juga melibatkan aspek budaya, sosial, dan moral.

Dalam konteks kebutuhan budaya, kemiskinan dapat mengakibatkan keterbatasan dalam mempraktikkan adat, upacara, serta nilai moral dan etika (Hernawati, 2017). Di tingkat sosial, keterbatasan mungkin mencakup akses terhadap pendidikan, kemampuan berkomunikasi, dan interaksi dengan sesama. Bahkan, pada tingkat yang lebih mendasar, kemiskinan dapat memengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, makanan, dan tempat tinggal.

Memahami kemiskinan dari sudut pandang yang komprehensif sangat penting agar dapat berkonsentrasi dan menerapkan strategi yang lebih komprehensif dan tepat sasaran untuk mengatasinya (Vania Grace Sianturi et al., 2021). Keterlibatan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor komersial, sangat penting dalam pengembangan solusi berkelanjutan. Melalui kajian menyeluruh terhadap faktor-faktor mendasar yang menyebabkan kemiskinan dan keberhasilan penyelesaian berbagai manifestasi permasalahan ini, masyarakat dapat secara kolaboratif menyusun strategi untuk memutus siklus kemiskinan yang sedang berlangsung.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai langkah utama dalam upayanya untuk mengurangi kemiskinan. Perpres Nomor 15 Tahun 2010 memberikan landasan hukum bagi PKH untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan menjadi 8-10% pada tahun 2014. PKH merupakan bagian dari kluster pertama yang dibentuk oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).), terutama berkonsentrasi pada pemberian bantuan dan perlindungan sosial. Program ini mencakup berbagai upaya, yaitu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan PKH itu sendiri. Pada saat yang sama, kluster kedua memprioritaskan pengembangan masyarakat, seperti Program Nasional Bina Lingkungan Mandiri (PNPM), sedangkan kluster ketiga fokus pada pengembangan usaha mikro melalui Program Kredit Usaha Rakyat.

Indikator keberhasilan program ini mencakup peningkatan kehidupan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan taraf kehidupan, dan kualitas sumber daya manusia (Almizi & Hermawati, 2018).

Melalui upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, seperti melalui koperasi dan pendekatan kelompok, pemerintah berharap dapat merangsang pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang memengaruhi positif penduduk miskin. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, PKH bukan hanya menjadi instrumen bantuan, tetapi juga merupakan alat penting dalam mewujudkan transformasi sosial ekonomi menuju kehidupan yang lebih berkelanjutan dan bermakna bagi masyarakat miskin.

Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di dalam negeri. Tujuan PKH adalah memberikan bantuan keuangan kepada keluarga penerima manfaat, dengan fokus khusus pada ibu hamil dan anak, melalui pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Program PKH bukan sekedar perpanjangan dari inisiatif Subsidi Langsung Tunai, namun merupakan upaya bersama untuk membangun sistem perlindungan sosial holistik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan memutus siklus kemiskinan.

Program ini bertujuan untuk memberikan akses mudah bagi keluarga miskin terhadap fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan di sekitar mereka, dengan penekanan khusus pada pemenuhan kebutuhan dasar ibu hamil, anak, warga lanjut usia, dan individu dengan disabilitas berat. PKH bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan peserta dalam inisiatif pendidikan anak dan kesehatan keluarga, guna mendorong perubahan perilaku dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, sekaligus mengurangi beban keuangan keluarga miskin dan rentan.

Tujuan utama PKH adalah untuk meringankan beban keuangan keluarga miskin dalam jangka pendek. Dalam jangka menengah dan panjang, program ini bertujuan untuk melahirkan generasi yang lebih sehat jasmani dan rohani, maju secara intelektual, dan mandiri. Selain itu, berupaya memutus siklus kemiskinan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Andriany, Vicy Andriany, 2022). Program ini bertujuan untuk membantu keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam program data terpadu untuk penanggulangan kemiskinan. Kriteria kelayakan program mencakup beberapa dimensi seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Tujuan utama PKH adalah menjadi pilar fundamental dalam pengentasan kemiskinan, memfasilitasi pencapaian tujuan Pembangunan Milenium, dan menetapkan hak dan tanggung jawab yang jelas bagi penerima manfaat.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), besaran bantuan tunai bersyarat yang diterima oleh peserta berbeda-beda sesuai dengan komponen yang mereka miliki. Tabel besaran bantuan tahun 2020 menunjukkan jumlah nominal yang beragam, seperti untuk ibu hamil, anak usia dini, pelajar SD, SMP, dan SMA, serta penyandang disabilitas berat dan lansia. Jumlah maksimal komponen yang dapat diterima oleh satu keluarga adalah empat, dan pembayaran bantuan dilakukan dalam empat tahap setiap tahunnya.

Proses penyaluran bantuan PKH memiliki tahapan yang melibatkan penyediaan data calon peserta, penetapan lokasi dan sasaran, validasi data, pembayaran dana tunai, verifikasi kepatuhan kewajiban, dan pemutakhiran data. Pembayaran dana tunai dilakukan dalam empat tahap pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Selain itu, ada mekanisme penghentian atau penangguhan bantuan bagi peserta yang tidak memenuhi kewajiban

yang ditetapkan. Mekanisme ini mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan kehadiran dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)/FDS setiap bulan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara Program Keluarga Harapan (PKH) dan pengentasan kemiskinan. Lokasi penelitian dipilih di Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, dengan pertimbangan jumlah penerima bantuan PKH yang terbanyak namun mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir. Populasi penelitian mencakup 372 peserta PKH aktif di kelurahan tersebut. Pengambilan sampel menggunakan teknik Simple Random Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 79 orang, dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan skala Likert yang mencakup aspek efektivitas PKH dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mendukung data penelitian, seperti gambar lokasi dan data sekunder dari Badan Pusat Statistik, jurnal, website Kota Dumai, dan Sekretariat UPPKH Kota Dumai.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metodologi deskriptif kuantitatif. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner langsung dari responden, sedangkan data sekunder bersumber dari berbagai media termasuk Badan Pusat Statistik dan jurnal akademik. Data diolah dengan menggunakan perangkat lunak komputer SPSS 24 dan Microsoft Office Excel. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai dampak Program Keluarga Harapan terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur melalui kajian data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program

Program Keluarga Harapan merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memitigasi permasalahan kemiskinan di Indonesia. PKH berbeda dengan program Subsidi Langsung Tunai, yang selama ini diterapkan untuk membantu RTM menjaga daya beli selama penyesuaian harga bahan bakar pemerintah. Tujuan utama PKH adalah untuk membangun jaring pengaman sosial yang komprehensif bagi masyarakat miskin, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan dan memutus siklus kemiskinan yang masih berlangsung selama ini.

Tabel 1 Frekuensi Responden Tentang Giat Pertemuan Kelompok

No	Item	SS n=5		S n=4		RR n=3		TS n=2		STS n=1		Σ F	Σ F.n
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	GP 1	51	64,6	28	35,4	0	0	0	0	0	0	79	367

Sumber: Olahan Peneliti 2023

Berdasarkan data tabel di atas dapat di ketahui bahwa indikator GP 1 yaitu dengan pertemuan kelompok mengubah pola pikir peserta untuk menjadi mandiri, responden menjawab sangat setuju 51 orang atau 64,6 % dan responden menjawab setuju berjumlah 28 orang atau 35,4 %. Dapat di ketahui bahwa dengan adanya pertemuan kelompok mampu mengubah pola pikir peserta untuk menjadi mandiri. Mandiri disini ialah mandiri untuk tidak menerima bantuan lagi atau bisa di sebut garis ekonominya sudah membaik. KPM yang sudah sejahtera dianggap sudah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga. Baik itu kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya. Jika KPM sudah mandiri maka tidak dianggap masyarakat dengan status miskin lagi.

Tabel 2 Frekuensi Responden Tentang Kesehatan

No	Item	SS n=5		S n=4		RR n=3		TS n=2		STS n=1		Σ F	Σ F.n
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	KS 1	39	49.4	40	50.6	0	0	0	0	0	0	79	355
2	KS 2	46	58.2	33	41.8	0	0	0	0	0	0	79	362
													717

Sumber: Olahan Peneliti 2023

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Teluk Binjai berhasil membantu meningkatkan aspek kesehatan keluarga penerima manfaat. Data menunjukkan tingkat persetujuan yang tinggi terkait pemeriksaan kesehatan anak usia 0-6 tahun di posyandu, dengan 49,4% sangat setuju dan 50,6% setuju. Selain itu, 58,2% responden sangat setuju dan 41,8% setuju bahwa fasilitas kesehatan mudah diakses oleh anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Skor akhir keseluruhan sub-indikator kesehatan mencapai 717, menunjukkan keberhasilan PKH dalam mendukung aspek kesehatan dan berpotensi meningkatkan produktivitas serta kualitas sumber daya manusia. Upaya ini diharapkan dapat membantu keluarga penerima manfaat PKH untuk keluar dari zona kemiskinan dan mencapai kemandirian ekonomi.

Tabel 3 Frekuensi Responden Tentang Pendidikan

No	Item	SS n=5		S n=4		RR n=3		TS n=2		STS n=1		Σ F	Σ F.n
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	P 1	51	64.6	28	35.4	0	0	0	0	0	0	79	367
2	P 2	44	55.7	35	44.3	0	0	0	0	0	0	79	360
													727

Sumber: Olahan Peneliti 2023

Berdasarkan analisis data pada tabel, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah memberikan kontribusi positif terhadap indikator pendidikan anak peserta PKH di Kelurahan Teluk Binjai. Indikator pertama menunjukkan bahwa 64,6% responden sangat setuju dan 35,4% setuju bahwa anak peserta PKH mampu mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik. Selanjutnya, pada indikator kedua, sebanyak 55,7% responden sangat setuju dan 44,3% setuju bahwa wajib belajar 12 tahun untuk anak sekolah terpenuhi, menandakan bahwa adanya bantuan PKH mendukung kelangsungan pendidikan anak tanpa putus sekolah. Skor akhir keseluruhan sub-indikator mencapai

727, masuk dalam kategori tinggi, membuktikan efektivitas tinggi dari intervensi pendidikan dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Pendidikan yang terpenuhi diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, mengurangi tingkat pengangguran, dan pada gilirannya, membantu menekan angka kemiskinan dengan memberikan kesempatan pekerjaan yang layak kepada keluarga penerima manfaat PKH.

Tabel 4 Frekuensi Responden Tentang Pemanfaatan Bantuan PKH

No	Item	SS n=5		S n=4		RR n=3		TS n=2		STS n=1		Σ F	Σ F.n
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	PB 1	48	60.8	31	39.2	0	0	0	0	0	0	79	364
2	PB 2	56	70.9	23	29.1	0	0	0	0	0	0	79	372
													736

Sumber: Olahan Peneliti 2023

Dari hasil analisis data pada tabel, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Teluk Binjai terbukti efektif dalam pemanfaatan dan pemberdayaan ekonomi keluarga penerima manfaat. Indikator pertama mengenai penggunaan dana PKH yang tepat sasaran menunjukkan tingkat persetujuan yang tinggi, dengan 60,8% responden sangat setuju dan 39,2% setuju. Selanjutnya, pada indikator kedua mengenai kontribusi dana PKH dalam membantu perbaikan ekonomi keluarga, sebanyak 70,9% responden sangat setuju dan 29,1% setuju. Skor akhir keseluruhan sub-indikator mencapai 736, masuk dalam kategori tinggi, menandakan efektivitas tinggi dari pemanfaatan bantuan PKH dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Pemanfaatan dana bantuan PKH yang tepat sasaran diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga, mendukung pemenuhan kebutuhan keluarga, dan secara bertahap memperbaiki perekonomian keluarga. Kesenambungan upaya ini diharapkan dapat mendorong keluarga penerima manfaat PKH untuk mencapai kemandirian ekonomi dan keluar dari garis kemiskinan.

Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan Kemiskinan adalah suatu cara atau upaya untuk memberantas kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Selain kegiatan pembangunan ada berbagai program - program pengentasan kemiskinan yang telah diupayakan untuk menanggulangi kemiskinan. Berbagai program tersebut diantaranya KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), dan bantuan operasional sekolah (BOS). Sederet program penanggulangan kemiskinan tersebut akan diberikan kepada keluarga miskin. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan telah menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Tabel 5 Tabel Frekuensi Responden Tentang Peningkatan Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

No	Item	SS n=5		S n=4		RR n=3		TS n=2		STS n=1		Σ F	Σ F.n
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	KPKD 1	30	38	41	51.9	8	10.1	0	0	0	0	79	338
2	KPKD 2	35	44.3	43	54.4	1	1.3	0	0	0	0	79	350
													688

Sumber: Olahan Peneliti 2023

Dari hasil analisis data pada tabel, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) secara signifikan berdampak positif terhadap kemampuan keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama terlihat pada indikator mampu membeli makanan bergizi (4 sehat 5 sempurna) dan kepemilikan pakaian berbeda di rumah. Sebagian besar responden menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap ketersediaan makanan bergizi dan pakaian berbeda di rumah, menunjukkan efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Meskipun terdapat beberapa responden yang ragu-ragu atau tidak familiar dengan konsep makanan bergizi, skor akhir keseluruhan sub-indikator mencapai 688, masuk dalam kategori tinggi. Pemenuhan kebutuhan dasar

melalui PKH dapat dianggap sebagai langkah positif dalam mendukung pengentasan kemiskinan, karena tidak hanya berkontribusi pada kualitas hidup keluarga, tetapi juga pada produktivitas anggota keluarga dan kesejahteraan ekonomi keluarga secara keseluruhan.

Tabel 6 Tabel Frekuensi Responden Tentang Peningkatan Taraf Kehidupan

No	Item	SS n=5		S n=4		RR n=3		TS n=2		STS n=1		Σ F	Σ F.n
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	TK 1	41	51.9	38	48.1	0	0	0	0	0	0	79	357
2	TK 2	27	34.2	52	65.8	0	0	0	0	0	0	79	343
3	TK 3	44	55.7	35	44.3	0	0	0	0	0	0	79	360
													1060

Sumber: Olahan Peneliti 2023

Berdasarkan data tabel di atas dapat di ketahui bahwa indikator pertama yaitu Anak peserta (KPM) semakin rajin ke sekolah, responden menjawab sangat setuju berjumlah 41 orang atau 51,9 % dan responden menjawab setuju berjumlah 38 orang atau 48,1 %. Dapat diketahui bahwa anak peserta (KPM) semakin rajin ke sekolah.

Selanjutnya, indikator yang kedua yaitu Ibu hamil semakin rajin memeriksakan kesehatan di posyandu, responden menjawab sangat setuju berjumlah 27 orang atau 34,2 % dan responden menjawab setuju berjumlah 52 orang atau 62,8 %. Dapat di ketahui bahwa dengan adanya bantuan PKH, ibu hamil semakin rajin memeriksakan kesehatan di posyandu. Hal ini bertujuan agar kandungan ibu hamil tetap sehat sampai proses persalinan.

Selanjutnya, indikator yang ketiga yaitu Peserta dan anggota keluarga tidak memiliki kendala untuk berobat, responden menjawab sangat setuju berjumlah 44 orang atau 55,7 % dan responden menjawab setuju berjumlah 35 orang atau 44,3 %. Dapat di ketahui bahwa dengan adanya bantuan PKH, maka peserta dan anggota keluarga tidak memiliki kendala untuk berobat.

Berdasarkan penghitungan skor akhir keseluruhan sub indikator, menunjukkan skor 1060, indikator peningkatan taraf

kehidupan termasuk kategori tinggi, membuktikan bahwa indikator peningkatan taraf kehidupan efektif terhadap keberhasilan pengentasan kemiskinan.

Meningkatnya taraf kehidupan KPM dapat dilihat dari kualitas pendidikan anak KPM, baik itu dari segi frekuensi kehadiran di sekolah atau pencapaian prestasi di sekolah. Selain itu, anak balita yang sehat juga akan menjadikan anak yang tangguh dan siap berprestasi ke depannya. Tentu saja situasi ini sangat mendorong sebuah keluarga keluar dari garis kemiskinan. Memiliki anak yang berprestasi dan SDM yang berkualitas akan membantu perekonomian keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga nantinya tanpa dibantu oleh pemerintah.

Tabel 7 Frekuensi Responden Tentang Peningkatan Kualitas SDM

No	Item	SS n=5		S n=4		RR n=3		TS n=2		STS n=1		Σ F	Σ F.n
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	KSDM 1	46	58.2	33	41.8	0	0	0	0	0	0	79	362
2	KSDM 2	27	34.2	52	65.8	0	0	0	0	0	0	79	343
													705

Sumber: Olahan Peneliti 2023

Berdasarkan data tabel di atas dapat di ketahui bahwa indikator pertama yaitu Peserta mendapatkan pembekalan pengetahuan baru yang berguna untuk meningkatkan taraf kehidupan, responden menjawab sangat setuju berjumlah 46 orang atau 52,8 % dan responden menjawab setuju berjumlah 33 orang atau 41,8 %. Dapat di ketahui bahwa dengan adanya bantuan PKH, peserta mendapatkan pembekalan pengetahuan baru yang berguna untuk meningkatkan taraf kehidupan.

Selanjutnya, indikator kedua yaitu Peserta dapat meningkatkan pendapatan secara finansial, responden menjawab sangat setuju berjumlah 27 orang atau 34,2 % dan responden menjawab setuju berjumlah 52 orang atau 65,8 %. Dapat diketahui bahwa dengan adanya bantuan PKH, anggota KPM bisa meningkatkan pendapatan secara finansial.

Berdasarkan penghitungan skor akhir keseluruhan sub indikator, menunjukkan skor 705, indikator peningkatan kualitas SDM termasuk kategori tinggi, membuktikan bahwa indikator peningkatan kualitas SDM efektif terhadap keberhasilan pengentasan kemiskinan.

SDM yang berkualitas dalam sebuah keluarga akan meningkat taraf kehidupan keluarga semakin baik. Hal ini karena SDM yang berkualitas juga akan berdampak pada kualitas pendidikan dan keterampilan manusia. Hal inilah yang akan mendorong sebuah keluarga untuk keluar dari garis kemiskinan karena akan mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara mandiri.

Penelitian-penelitian tentang keberhasilan Program Keluarga Harapan sebagai interpretasi dari variable Program Keluarga Harapan, telah banyak dilakukan. Studi yang dilakukan oleh Direktur Jendral Sosial dan Jaminan social RI, Puslit kemensos RI, maupun yang dilakukan oleh World Bank yang memaparkan keberhasilan PKH. Mulai dari manfaat jangka pendek bantuan langsung tunai terhadap anggaran keluarga KPM. Dampak perubahan perilaku terhadap investasi pendidikan dan kesehatan untuk anggota keluarga dimana dirangkul dalam tujuan kesejahteraan keluarga peserta PKH. Tujuan dari PKH sendiri tidak hanya didesain untuk menjaga keluarga dengan kategori keluarga sangat miskin tetap terjaga meskipun keadaan ekonomi shock. Tetapi melalui bantuan tunai bersyarat yaitu bantuan Program Keluarga Harapan, dengan syarat keluarga penerima manfaat ini aktif untuk menanam investasi bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam melaksanakan kewajibannya para KPM ini juga didampingi oleh seorang pendamping. Tidak hanya sebagai verifikator kewajiban KPM. Tetapi juga sebagai melakukan fungsi pendampingan dan motivator yang dibekali dengan materi materi giat pertemuan kelompok.

Dengan bantuan Program Keluarga Harapan yang telah diterima di Kelurahan Teluk Binjai ini sangat diharapkan Keluarga Penerima Manfaat agar meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan serta keaktifan KPM dalam Pertemuan Kelompok. Adanya peningkatan kemampuan dalam pengelolaan keluarga meliputi materi ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengasuhan anak, pengelolaan keuangan keluarga. Dan juga ditunjang adanya usaha produktif yang menunjang pendapatan keluarga. Sehingga menjadi keluarga keluarga yang mandiri dengan taraf kehidupan yang lebih baik. Kedua treatment tersebut dapat dilakukan untuk tercapainya kegiatan Program Pengentasan Kemiskinan. Sehingga peningkatan ekonomi KPM dapat bertambah agar menopang ekonomi dengan sendirinya tanpa bantuan dari pihak manapun.

Tabel 8 hasil uji t (pengaruh)

		Independent Samples Test								
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Hasil	Equal variances assumed	.336	.563	16.125	156	.000	16.443	1.020	14.429	18.457
	Equal variances not assumed			16.125	155.895	.000	16.443	1.020	14.429	18.457

Sumber: Olahan Data SPSS 24

Hasil uji t-statistik menunjukkan bahwa untuk variabel pelatihan Program Keluarga Harapan (PKH) ini memperoleh nilai sig $0,000 < \alpha (0,05)$ Artinya variabel Program Keluarga Harapan memiliki pengaruh dalam Pengentasan Kemiskinan. Hal itu berarti H1 diterima dan H0 di tolak.

Tabel 9 hasil uji f (efektivitas)

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Total_X1	97.06	79	6.491	.730
	Total_Y	80.62	79	6.325	.712

Sumber: Olahan Data SPSS 24

Paired Samples Correlations				
		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Total_X1 & Total_Y	79	.664	.000

Sumber: Olahan Data SPSS 24

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian secara simultan (uji F) variabel Program Keluarga Harapan (X), terhadap variabel Pengentasan Kemiskinan (Y) menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang didapatkan sebesar 0,000. Oleh karena nilai sig. 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan bahwa variabel Program Keluarga Harapan (X) secara simultan berpengaruh signifikan (efektif) terhadap variabel Pengentasan Kemiskinan (Y), yang berarti H1 di terima dan H0 di tolak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil kesimpulan berupa:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki dampak positif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Beberapa pengaruh signifikan dari program ini meliputi peningkatan akses pendidikan anak, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta bantuan tunai yang membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Meskipun demikian, beberapa tantangan seperti administrasi dan pemantauan masih perlu diatasi agar program ini dapat mencapai potensi penuhnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Kesimpulannya, Program Keluarga Harapan memberikan kontribusi positif dalam mengurangi kemiskinan melalui berbagai aspek yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan bantuan ekonomi kepada keluarga miskin.
2. Hasil uji t-statistik menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara

Program Keluarga Harapan (PKH) dengan pengentasan kemiskinan. Dengan nilai sig. sebesar 0,000 (kurang dari alpha 0,05), maka H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya, Program Keluarga Harapan berkontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Hasil pengujian efektivitas menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 (0,000) menunjukkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya, Program Keluarga Harapan efektif dalam mengentaskan kemiskinan.

Saran

Berikut ini merupakan saran-saran yang diberikan sesuai dengan hasil penelitian.

1. Bagi pelaksanaan Program Keluarga Harapan perlu ditingkatkan untuk pelaksanaan kedepannya. Pada Program Keluarga Harapan hendaknya bekerja sama kepada instansi terkait yaitu pada pihak Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Instansi Sekolah, pihak Kelurahan, pihak Kecamatan agar mempunyai timbal balik pada tujuan Program Keluarga Harapan. Jadi KPM Program Keluarga Harapan tidak hanya menerima bantuan uang tunai saja tanpa memeriksakan kesehatan keluarga dan juga tidak memperhatikan pendidikan anak – anaknya. Sehingga tidak ada lagi penerima Program Keluarga Harapan yang masih terdapat gizi buruk dan putus sekolah.
2. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program transfer tunai bersyarat bertujuan meningkatkan akses pendidikan dasar dan kesehatan bagi penerima manfaat. Namun, alokasi uang tunai dari PKH lebih berfokus pada akses minimum, tanpa memberikan kontribusi langsung pada peningkatan kualitas layanan. Untuk memastikan manfaat yang optimal,

pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas penyedia layanan, terutama dalam ketersediaan dan adaptabilitas sarana dan prasarana. Jika fasilitas layanan tidak memadai, upaya pemberian uang tunai untuk meningkatkan akses tidak akan efektif. Selain itu, sarana dan prasarana tersebut harus mampu beradaptasi dengan budaya dan struktur masyarakat setempat. Pendampingan untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan anak terhadap pentingnya pendidikan perlu disertai dengan kemampuan adaptasi penyedia layanan terhadap konteks ekonomi dan sosial masyarakat yang bersangkutan.

3. Masalah terkait data kemiskinan yang belum terpecahkan di Indonesia menjadi salah satu hambatan utama, terutama di tingkat lokal. Diperlukan upaya mendesak untuk membangun data kemiskinan yang terintegrasi dan real-time secara nasional. Pentingnya mencapai konsensus tentang indikator dan kriteria kemiskinan antar satuan kerja pemerintahan, serta peran krusial birokrasi di tingkat pemerintahan terendah (desa/kelurahan) dalam proses verifikasi dan konfirmasi data.
4. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan pengembangan dengan mengeksplorasi atau menambah variabel lain yang berpotensi memengaruhi keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan, diluar Program Keluarga Harapan yang merupakan fokus dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Almizi, M., & Hermawati, I. (2018). Upaya Pengentasan Kemiskinan dengan Mengurangi Konsumsi Rokok di Indonesia The Effort of Poverty Alleviation by Reducing Cigarettes Consumption in Indonesia. Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan,*

- 17(3), 239–256.
- ANDRIANY, VICY ANDRIANY, M. E. D. (2022). *Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan di Nagari Balimbing*. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v1i2.4920>
- Basri, M., Fuad, F., & Suartini, S. (2022). *Analisis Kriminologi Atas Perbuatan Pembunuhan Di Kabupaten Bulukumba*. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 7(1), 71. <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i1.1189>
- Badan Pusat Statistik, 2016
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). *Sustainable Development Goals : Tinjauan Percepatan Pencapaian Di Provinsi Riau*. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77–87. [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(1\).4995](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(1).4995)
- Hermawan, S.P., M.Si, D. I., Izzaty S.T., M.E., I., Budiyaniti, S.Si., M.S.E., E., Sari, S.E., M.S.E., R., Sudarwati, S.IP., M.Si., Y., & Teja, S.Sos., M.Si., M. (2021). *Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai di Kota Yogyakarta*. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(2), 131–145. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i2.2237>
- Hernawati, I. (2017). *Pengukuran konstruk kemiskinan di Indonesia The measurement of poverty construct in Indonesia*. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(3), 269–284.
- Mulatua, S., & Nggeboe, F. (2017). *Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI*. *Legalitas*, IX(1), 46–79.
- Rahman, P. A., Firman, & Rusdinal. (2019). *KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ILMU SOSIOLOGI*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3(6), 1542.
- Vania Grace Sianturi, M. Syafii, & Ahmad Albar Tanjung. (2021). *Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus (2016-2019)*. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(2), 125–133. <https://doi.org/10.33059/jse.v5i2.4270>